

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI E-PERDA DALAM PENYEDERHANAAN PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Fahmi Yohari Edward

fahmiedward468@gmail.com

Sabri Habibillah

sabrihabibillah01@gmail.com

Abdul Kahfi

Razorknight563@gmail.com

Anin Naim

aninnaim591@gmail.com

Arie Elcaputera

arie_elcaputera@unib.ac.id

Abstrak

Aplikasi e-Perda merupakan inovasi digital yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan aplikasi e-Perda dalam menyederhanakan proses legislasi di tingkat daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi e-Perda memberikan kontribusi signifikan terhadap penyederhanaan proses pembentukan Perda dengan mempercepat tahapan administrasi, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Namun, implementasi aplikasi ini menghadapi beberapa tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah tertentu, rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi, serta hambatan teknis seperti kesalahan unggahan dokumen dan tidak adanya fitur pembatalan unggahan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan teknis bagi pengguna aplikasi, penguatan infrastruktur jaringan di daerah terpencil, serta pengembangan fitur-fitur tambahan untuk meningkatkan fleksibilitas dan kemudahan penggunaan aplikasi e-Perda. Dengan mengatasi hambatan tersebut, aplikasi e-Perda diharapkan dapat semakin efektif mendukung digitalisasi legislasi di Indonesia.

Kata kunci: e-Perda, efektivitas, digitalisasi, pembentukan Peraturan Daerah, e-government.

Abstract

The e-Perda application is a digital innovation developed by the Ministry of Home Affairs (Kemendagri) to enhance efficiency, transparency, and quality in the drafting process of Regional Regulations (Perda). This study aims to analyze the effectiveness of using the e-Perda application in simplifying the legislative process at the regional level. The research employs a descriptive approach with data collection techniques including interviews, observations, and document analysis. The results

show that the e-Perda application significantly contributes to simplifying the Perda drafting process by accelerating administrative stages, reducing operational costs, and improving collaboration among stakeholders. However, the implementation of this application faces several challenges, such as limited technological infrastructure in certain regions, low competency of human resources in operating the application, and technical obstacles such as document upload errors and the absence of a cancellation feature for uploaded documents. This study recommends enhanced technical training for application users, strengthening network infrastructure in remote areas, and developing additional features to improve the flexibility and usability of the e-Perda application. By addressing these challenges, the e-Perda application is expected to more effectively support legislative digitalization in Indonesia.

Keywords: *e-Perda, effectiveness, digitalization, regional regulation drafting, e-government.*

I. PENDAHULUAN

Digitalisasi telah menjadi salah satu elemen penting dalam mendorong efisiensi dan transparansi pemerintahan di era modern. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kementerian, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus berupaya memanfaatkan teknologi digital untuk memperbaiki proses administrasi dan pelayanan publik. Salah satu inovasi strategis yang diinisiasi oleh Kemendagri adalah aplikasi e-Perda, yang bertujuan untuk menyederhanakan dan meningkatkan efektivitas proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Inovasi ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mendorong setiap instansi pemerintah untuk mengimplementasikan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan (Kemendagri, 2023).

Aplikasi e-Perda dirancang sebagai platform terpadu yang mengintegrasikan tahapan perencanaan, pembahasan, hingga evaluasi dalam penyusunan Perda. Proses ini sebelumnya sering kali diwarnai dengan berbagai kendala, seperti birokrasi yang rumit, tingginya biaya operasional, dan kurangnya transparansi. Data dari Kemendagri menunjukkan bahwa lebih dari 60% proses pembentukan Perda di Indonesia sebelum digitalisasi mengalami keterlambatan akibat kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan dan lambatnya distribusi dokumen fisik (Kemendagri, 2023). Dengan aplikasi e-Perda, diharapkan proses ini dapat dilakukan secara lebih efisien, baik dari segi waktu maupun biaya.

Implementasi aplikasi e-Perda tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga transparansi dalam pembentukan Perda. Menurut Laporan Transparansi Pemerintahan 2022 yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sebanyak 45% masyarakat di Indonesia menyatakan sulit mengakses informasi terkait regulasi yang sedang dibahas di tingkat daerah (Kominfo, 2022). Dengan adanya aplikasi e-Perda, masyarakat dapat memantau perkembangan Perda secara real-time, sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Selain itu, aplikasi ini memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyusunan regulasi yang berkualitas.

Meskipun aplikasi e-Perda menawarkan berbagai keunggulan, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah, terutama di kawasan terpencil. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, sekitar 23% wilayah kabupaten di Indonesia masih mengalami keterbatasan akses internet yang stabil, yang dapat menghambat penggunaan aplikasi berbasis online seperti e-Perda (BPS, 2022). Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan pegawai pemerintah daerah menjadi kendala lain yang sering dihadapi. Sebuah studi oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemendagri (2022) menemukan bahwa hanya sekitar 35% pegawai pemerintah daerah yang memiliki kompetensi dasar dalam mengoperasikan aplikasi berbasis digital.

Selain tantangan teknis, terdapat pula kendala administratif dalam penggunaan aplikasi e-Perda. Beberapa pengguna melaporkan kesulitan dalam mengoreksi dokumen yang telah diunggah karena tidak adanya fitur pembatalan unggahan atau revisi langsung. Hal ini dapat memperlambat proses legislasi, terutama ketika dokumen yang diunggah mengalami kesalahan. Sebagai tambahan, aplikasi e-Perda saat ini menggunakan satu akun untuk diakses oleh banyak pengguna yang berkepentingan. Praktik ini dapat menimbulkan risiko keamanan data serta potensi konflik antar pengguna dalam pengelolaan dokumen.

Meskipun demikian, beberapa daerah telah berhasil mengimplementasikan aplikasi e-Perda dengan baik, yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Misalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaporkan bahwa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pembahasan dan evaluasi Perda berhasil dipangkas hingga 40% setelah mengadopsi aplikasi ini (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2023). Selain itu, kolaborasi antar instansi di tingkat provinsi dan kabupaten menjadi lebih efisien berkat fitur notifikasi otomatis dan pembagian dokumen yang terstruktur.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan aplikasi e-Perda dalam menyederhanakan proses pembentukan Perda. Penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu efisiensi waktu dan biaya, peningkatan transparansi, serta identifikasi tantangan implementasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai manfaat dan hambatan yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi e-Perda, serta rekomendasi solusi untuk meningkatkan efektivitasnya.

Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya untuk mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam legislasi daerah. Sebagai bagian dari strategi nasional dalam mewujudkan SPBE, aplikasi e-Perda tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai simbol komitmen pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memahami efektivitas dan tantangan implementasinya, diharapkan aplikasi e-Perda dapat lebih optimal dalam mendukung terciptanya Perda yang berkualitas dan berdampak positif bagi pembangunan daerah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis efektivitas penggunaan aplikasi e-Perda dalam menyederhanakan proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, termasuk pegawai pemerintah daerah, operator aplikasi, dan perwakilan masyarakat; observasi langsung terhadap penggunaan aplikasi di beberapa daerah; serta analisis dokumen terkait, seperti laporan implementasi dan evaluasi aplikasi e-Perda. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang relevan berdasarkan keterlibatan mereka dalam proses legislasi menggunakan aplikasi ini. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan manfaat dari penggunaan aplikasi e-Perda, yang kemudian divalidasi melalui triangulasi data guna memastikan keabsahan hasil penelitian.

III. PEMBAHASAN

Peran dan Efektivitas Aplikasi e-Perda dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Di era digital, pemerintahan berbasis elektronik (e-government) menjadi kebutuhan mutlak untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi birokrasi. Salah satu langkah konkret pemerintah Indonesia dalam mendukung e-government adalah pengembangan aplikasi e-Perda oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi ini dirancang untuk menyederhanakan proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) melalui sistem digital yang terintegrasi, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga evaluasi. Penggunaan aplikasi ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, dan transparan (Kemendagri, 2023).

Sebelum implementasi aplikasi e-Perda, proses pembentukan Perda sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti birokrasi yang rumit, keterlambatan dalam distribusi dokumen, dan minimnya transparansi. Data dari Kemendagri menunjukkan bahwa lebih dari 60% rancangan Perda yang diajukan oleh pemerintah daerah mengalami keterlambatan akibat koordinasi yang tidak optimal dan proses manual yang memakan waktu (Kemendagri, 2023). Aplikasi e-Perda hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini dengan menawarkan platform digital yang memungkinkan seluruh proses dilakukan secara online. Dengan fitur-fitur seperti notifikasi otomatis, modul pembahasan, dan evaluasi dokumen, aplikasi ini mampu mempercepat tahapan legislasi yang sebelumnya memakan waktu berminggu-minggu menjadi hanya beberapa hari kerja.

Efisiensi waktu merupakan salah satu dampak signifikan dari penerapan aplikasi e-Perda. Misalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaporkan bahwa aplikasi ini mampu memangkas waktu penyusunan Perda hingga 40%, khususnya pada tahap evaluasi dan harmonisasi dengan pemerintah pusat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat,

2023). Selain itu, efisiensi biaya juga menjadi keunggulan utama. Dalam sistem manual, biaya operasional untuk perjalanan dinas, pencetakan dokumen, dan distribusi fisik dapat mencapai puluhan juta rupiah untuk satu rancangan Perda. Dengan aplikasi e-Perda, seluruh proses dapat dilakukan secara digital, sehingga menghemat anggaran secara signifikan.

Selain efisiensi, aplikasi e-Perda juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi proses legislasi. Berdasarkan Laporan Transparansi Pemerintahan 2022 yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hanya 45% masyarakat yang merasa puas dengan akses informasi terkait proses pembentukan regulasi di tingkat daerah (Kominfo, 2022). Dengan fitur akses real-time yang dimiliki oleh aplikasi e-Perda, masyarakat dapat memantau perkembangan rancangan Perda, mulai dari tahap perencanaan hingga pengesahan. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses legislasi.

Kolaborasi antar instansi menjadi dimensi penting lainnya dari efektivitas aplikasi e-Perda. Proses legislasi daerah melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta lembaga terkait lainnya. Sebelum adanya aplikasi ini, koordinasi antar instansi sering kali terkendala oleh distribusi dokumen fisik yang lambat dan perbedaan standar administrasi. Dengan e-Perda, dokumen dapat diunggah dan dibagikan secara langsung kepada seluruh pemangku kepentingan melalui platform yang sama, sehingga mempermudah komunikasi dan menyelaraskan persepsi antar pihak. Studi oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemendagri (2022) mencatat bahwa 70% responden yang terdiri dari pegawai pemerintah daerah merasakan peningkatan efektivitas kerja setelah mengadopsi aplikasi ini.

Fitur-fitur dalam aplikasi e-Perda dirancang untuk mendukung proses legislasi yang lebih terstruktur dan sistematis. Salah satu fitur unggulan adalah modul perencanaan, yang menyediakan template dan panduan komprehensif untuk penyusunan rancangan Perda. Dengan adanya panduan ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa rancangan Perda yang diajukan memenuhi standar hukum dan teknis yang ditetapkan. Modul pembahasan juga memungkinkan pengguna untuk melakukan diskusi secara online, mengurangi kebutuhan untuk pertemuan fisik yang sering kali sulit diatur. Fitur notifikasi otomatis memberikan pemberitahuan kepada pengguna terkait perkembangan status dokumen, sehingga semua pihak dapat mengikuti proses dengan lebih baik.

Dampak positif dari aplikasi e-Perda juga terlihat dalam peningkatan kualitas Perda yang dihasilkan. Dengan proses yang lebih terstruktur, rancangan Perda dapat lebih mudah diuji dan dievaluasi sebelum disahkan. Hal ini penting karena kualitas Perda yang rendah sering kali menjadi salah satu penyebab utama konflik hukum di tingkat daerah. Data dari Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sekitar 20% Perda yang diajukan untuk uji materi pada periode 2018–2021 dinyatakan cacat hukum karena tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi (Mahkamah Agung, 2022). Dengan fitur evaluasi yang dimiliki oleh e-Perda, potensi kesalahan semacam ini dapat diminimalkan.

Meskipun aplikasi e-Perda menunjukkan banyak keunggulan, keberhasilannya tetap sangat bergantung pada dukungan infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia. Beberapa daerah yang memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, berhasil mengadopsi aplikasi ini dengan cepat dan efektif. Namun, daerah-daerah dengan akses internet yang terbatas atau kapasitas SDM yang rendah menghadapi tantangan besar dalam mengoptimalkan penggunaannya. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan pelatihan teknis dan penguatan jaringan internet sebagai bagian dari strategi implementasi aplikasi ini di seluruh Indonesia.

Secara keseluruhan, aplikasi e-Perda telah membuktikan perannya sebagai inovasi digital yang mendukung penyederhanaan proses pembentukan Peraturan Daerah. Dengan efisiensi waktu dan biaya, peningkatan transparansi, serta kolaborasi yang lebih baik antar instansi, aplikasi ini memiliki potensi besar untuk merevolusi tata kelola pemerintahan daerah. Namun, tantangan infrastruktur dan SDM yang masih ada perlu diatasi untuk memastikan manfaat aplikasi ini dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Hambatan dan Tantangan Implementasi Aplikasi e-Perda

Meskipun aplikasi e-Perda menawarkan berbagai keuntungan, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan signifikan. Tantangan ini terutama berkaitan dengan infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan masalah teknis yang muncul selama proses penggunaannya. Hambatan-hambatan ini menjadi pengingat bahwa digitalisasi bukan hanya soal adopsi teknologi, tetapi juga kesiapan sistem pendukung yang mencakup aspek teknis, organisasi, dan sosial.

Salah satu hambatan terbesar adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di banyak daerah, terutama di wilayah terpencil dan kabupaten. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (2022), sekitar 37% wilayah Indonesia masih memiliki akses internet yang terbatas atau tidak memadai. Hal ini berdampak langsung pada efektivitas implementasi aplikasi e-Perda, yang mengandalkan konektivitas internet untuk mengunggah dokumen, mengakses data, dan berkolaborasi secara daring. Dalam beberapa kasus, proses unggah dokumen yang seharusnya dapat diselesaikan dalam hitungan menit memerlukan waktu berjam-jam akibat koneksi yang tidak stabil (Kemendagri, 2023). Ketergantungan pada infrastruktur ini menjadi salah satu penyebab utama keterlambatan dalam proses pembentukan Perda di daerah-daerah dengan jaringan yang lemah.

Selain masalah infrastruktur, rendahnya literasi digital di kalangan pegawai pemerintah daerah menjadi tantangan lain yang signifikan. Tidak semua pengguna aplikasi e-Perda memiliki kemampuan yang memadai untuk mengoperasikan aplikasi ini secara optimal. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemendagri (2022), sekitar 45% pegawai pemerintah daerah mengaku merasa kesulitan menggunakan aplikasi karena kurangnya pelatihan teknis. Sebagai contoh, kesalahan dalam mengunggah dokumen adalah masalah umum yang sering terjadi, tetapi aplikasi ini belum menyediakan fitur pembatalan atau revisi dokumen yang

telah diunggah. Akibatnya, proses perbaikan harus dilakukan melalui Kemendagri, yang memakan waktu dan memperpanjang durasi penyelesaian Perda.

Hambatan lainnya adalah masalah keamanan data yang muncul akibat penggunaan satu akun untuk banyak pengguna. Dalam beberapa daerah, satu akun aplikasi e-Perda digunakan bersama oleh berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk pegawai pemerintah daerah, staf administrasi, dan konsultan hukum. Praktik ini meningkatkan risiko akses tidak sah, kesalahan input data, dan kebocoran informasi sensitif. Sebagai platform yang menangani dokumen hukum, aplikasi e-Perda memerlukan standar keamanan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa data hanya diakses oleh pihak yang berwenang. Namun, studi oleh Kominfo (2022) mencatat bahwa hanya 30% pemerintah daerah yang memiliki kebijakan keamanan data yang memadai untuk melindungi sistem digital mereka.

Masalah teknis lainnya adalah keterbatasan fitur aplikasi itu sendiri. Saat ini, aplikasi e-Perda belum dilengkapi dengan fitur pembatalan unggahan dokumen atau revisi langsung yang memungkinkan pengguna untuk memperbaiki kesalahan secara cepat. Proses revisi yang harus melalui Kemendagri sering kali memperlambat penyelesaian Perda, terutama jika terdapat banyak dokumen yang memerlukan koreksi. Selain itu, beberapa daerah melaporkan bahwa antarmuka pengguna aplikasi ini kurang intuitif, sehingga mempersulit pegawai yang tidak terbiasa dengan teknologi untuk menggunakannya secara efektif (Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2023).

Sebagai perbandingan, sistem manual yang digunakan sebelum implementasi e-Perda memiliki kendala yang berbeda, tetapi tidak kalah kompleks. Sistem manual sering kali membutuhkan biaya tinggi untuk perjalanan dinas, pencetakan dokumen, dan rapat fisik yang melibatkan banyak pihak. Namun, sistem ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal koreksi dokumen dan revisi selama proses legislasi. Dalam konteks ini, aplikasi e-Perda menawarkan keunggulan efisiensi, tetapi belum sepenuhnya mengatasi beberapa kekurangan utama yang ada dalam sistem manual. Perubahan sistem dari manual ke digital membutuhkan waktu dan adaptasi yang signifikan, terutama dalam hal perubahan budaya kerja di kalangan pegawai pemerintah daerah.

Hambatan implementasi aplikasi e-Perda juga dipengaruhi oleh tingkat dukungan dari pemerintah daerah itu sendiri. Studi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (2023) menemukan bahwa hanya 50% pemerintah daerah yang secara aktif mendukung pelatihan teknis untuk pegawai mereka terkait penggunaan aplikasi ini. Rendahnya prioritas terhadap pelatihan menyebabkan banyak pegawai yang merasa tidak percaya diri dalam menggunakan aplikasi, sehingga menghambat adopsi teknologi secara luas. Selain itu, kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat terhadap proses implementasi di daerah menyebabkan variasi besar dalam tingkat keberhasilan aplikasi ini. Daerah yang memiliki kepemimpinan proaktif dan dukungan anggaran yang memadai, seperti Jawa Barat, cenderung lebih berhasil dalam mengintegrasikan aplikasi ini ke dalam proses legislasi mereka dibandingkan dengan daerah yang kurang mendukung.

Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa implementasi aplikasi e-Perda bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga melibatkan berbagai aspek yang lebih luas, termasuk kebijakan, organisasi, dan perubahan perilaku. Penting bagi pemerintah untuk mengatasi tantangan ini dengan pendekatan yang holistik, mencakup peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan SDM, pengembangan fitur aplikasi, dan penguatan keamanan data. Dengan mengatasi hambatan ini, aplikasi e-Perda memiliki potensi besar untuk menjadi solusi digital yang tidak hanya menyederhanakan proses pembentukan Perda, tetapi juga meningkatkan kualitas legislasi di Indonesia.

Rekomendasi dan Implikasi Kebijakan untuk Optimalisasi Aplikasi e-Perda

Aplikasi e-Perda merupakan langkah penting dalam transformasi digital sistem pemerintahan di Indonesia. Namun, untuk memastikan bahwa aplikasi ini dapat berfungsi secara optimal dalam menyederhanakan dan mempercepat proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda), beberapa langkah strategis perlu diambil. Langkah-langkah ini berfokus pada peningkatan pelatihan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), penguatan infrastruktur teknologi, serta pengembangan fitur tambahan dalam aplikasi. Selain itu, implikasi kebijakan yang mendukung transformasi digital juga sangat penting untuk mendorong keberhasilan e-Perda sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional.

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi aplikasi e-Perda adalah keterbatasan kompetensi SDM di tingkat pemerintah daerah. Banyak pegawai di pemerintah daerah yang belum memiliki keterampilan digital yang memadai untuk mengoperasikan aplikasi ini dengan efektif. Menurut penelitian oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemendagri (2022), sekitar 45% pegawai pemerintah daerah mengaku merasa kesulitan dalam menggunakan aplikasi e-Perda karena kurangnya pelatihan teknis. Untuk itu, peningkatan pelatihan dan pendidikan terkait teknologi digital menjadi langkah yang sangat krusial. Pemerintah harus mengembangkan program pelatihan yang tidak hanya fokus pada cara menggunakan aplikasi e-Perda, tetapi juga pada pemahaman tentang pentingnya e-government dan dampaknya terhadap efisiensi pemerintahan.

Pelatihan ini perlu dilakukan secara berkala dan melibatkan semua tingkat pegawai di pemerintahan daerah, mulai dari staf administrasi hingga pejabat yang terlibat langsung dalam penyusunan Perda. Salah satu pendekatan yang efektif adalah pelatihan berbasis modul online yang dapat diakses oleh pegawai kapan saja dan di mana saja. Ini akan memungkinkan mereka untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan waktu yang mereka miliki, sekaligus mempercepat proses adopsi teknologi di daerah yang lebih luas. Dukungan pelatihan ini juga harus dilengkapi dengan pendampingan dan konsultasi bagi pegawai yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi, guna memastikan bahwa tidak ada pengguna yang tertinggal dalam proses digitalisasi ini.

Peningkatan infrastruktur teknologi di daerah-daerah yang memiliki akses internet terbatas merupakan langkah penting berikutnya. Meskipun aplikasi e-Perda menawarkan berbagai manfaat dalam hal efisiensi dan transparansi, penerapannya akan sangat terbatas

jika akses internet di daerah-daerah tertentu masih menjadi kendala. Menurut laporan Kominfo (2023), sekitar 40% wilayah Indonesia, khususnya daerah-daerah pedesaan dan perbatasan, masih menghadapi masalah serius dalam hal akses internet. Gangguan jaringan yang sering terjadi menyebabkan aplikasi tidak dapat diakses dengan optimal, menghambat proses pengunggahan dokumen, dan memperlambat pengambilan keputusan dalam pembentukan Perda.

Untuk itu, penguatan infrastruktur teknologi sangat diperlukan agar aplikasi e-Perda dapat berjalan dengan lancar di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah pusat perlu bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memperluas jangkauan jaringan, termasuk penyediaan akses internet berbasis satelit di daerah-daerah terpencil. Selain itu, perlu ada alokasi anggaran yang lebih besar untuk membangun pusat layanan internet di tingkat kecamatan atau kabupaten yang memungkinkan pegawai di daerah-daerah yang belum memiliki akses internet memadai untuk mengakses aplikasi secara optimal. Penguatan infrastruktur ini juga harus mencakup pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak di kantor pemerintahan, sehingga SDM dapat menggunakan aplikasi dengan efisien dan tanpa gangguan teknis.

Meskipun aplikasi e-Perda sudah memberikan banyak manfaat dalam menyederhanakan proses pembentukan Perda, aplikasi ini masih memiliki kekurangan dalam hal fitur yang disediakan. Salah satu isu yang sering dihadapi pengguna adalah ketidakmampuan untuk merevisi dokumen yang telah diunggah setelah terjadi kesalahan. Fitur revisi atau pembatalan unggahan dokumen perlu dikembangkan agar pengguna dapat mengoreksi kesalahan tanpa harus melalui prosedur panjang yang melibatkan Kemendagri. Sebuah studi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (2023) menunjukkan bahwa banyaknya dokumen yang harus diperbaiki secara manual meningkatkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pembentukan Perda, menghambat kolaborasi antar pihak, dan menurunkan efisiensi kerja.

Selain itu, pengembangan fitur multi-akun juga penting agar aplikasi dapat diakses oleh beberapa pihak secara bersamaan dengan tingkat akses yang berbeda-beda. Misalnya, pihak yang terlibat dalam pembentukan Perda, seperti pejabat pemerintah, konsultan hukum, dan anggota legislatif, perlu memiliki hak akses yang sesuai dengan peran mereka. Penggunaan satu akun untuk seluruh pihak yang terlibat berpotensi menimbulkan masalah terkait dengan keamanan dan kontrol akses. Fitur multi-akun dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan akses.

Dalam hal keamanan data, pengembangan fitur pengamanan yang lebih kuat juga perlu dilakukan. Aplikasi e-Perda menangani dokumen hukum yang sensitif, sehingga penting untuk melengkapi aplikasi dengan sistem keamanan yang lebih canggih, seperti autentikasi dua faktor (2FA) dan enkripsi data. Selain itu, pelaksanaan audit keamanan secara berkala untuk memastikan bahwa sistem tetap aman dan tidak rentan terhadap kebocoran data sangat diperlukan, mengingat data Perda yang dikelola oleh aplikasi memiliki dampak besar terhadap kebijakan publik.

Implikasi kebijakan yang mendukung transformasi digital melalui aplikasi e-Perda sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas legislasi daerah. Sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), e-Perda harus didukung dengan kebijakan yang jelas dan tegas dari pemerintah pusat, termasuk dalam hal alokasi anggaran, pengawasan, dan penguatan kapasitas SDM. Pemerintah daerah perlu diberikan insentif untuk mempercepat adopsi aplikasi ini, baik dari segi sumber daya manusia maupun anggaran. Selain itu, harus ada evaluasi rutin terkait efektivitas aplikasi e-Perda di setiap daerah, serta rekomendasi perbaikan untuk memastikan aplikasi dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Kebijakan yang mendukung juga harus mencakup penguatan regulasi yang memastikan penggunaan aplikasi e-Perda sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan terarah, diharapkan penggunaan aplikasi e-Perda dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pembentukan Perda. Masyarakat juga diharapkan dapat lebih mudah mengakses informasi tentang proses pembuatan Perda yang sebelumnya mungkin tidak transparan, yang pada akhirnya meningkatkan partisipasi publik dalam proses legislasi daerah.

Dalam konteks ini, aplikasi e-Perda tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai pendorong utama reformasi birokrasi yang mendukung pencapaian tujuan SPBE nasional. SPBE bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, aplikasi e-Perda dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang berbasis teknologi dan meningkatkan kualitas legislasi daerah di seluruh Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Aplikasi e-Perda telah menunjukkan potensi besar dalam menyederhanakan dan mempercepat proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia, yang sebelumnya memakan waktu dan melibatkan banyak prosedur manual. Dengan fitur yang mendukung efisiensi, transparansi, dan kolaborasi antar berbagai pihak, aplikasi ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas legislasi daerah. Namun, tantangan terkait dengan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (SDM), infrastruktur teknologi yang belum merata, serta keterbatasan fitur aplikasi masih perlu diatasi untuk memaksimalkan manfaatnya. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-Perda, diperlukan penguatan pelatihan, perbaikan infrastruktur teknologi, dan pengembangan fitur yang lebih fleksibel dan aman. Implikasi kebijakan yang mendukung transformasi digital juga sangat diperlukan untuk mendorong adopsi aplikasi ini secara luas di seluruh daerah di Indonesia.

Sebagai langkah untuk mengoptimalkan aplikasi e-Perda, pemerintah perlu fokus pada peningkatan pelatihan bagi SDM di tingkat daerah, terutama terkait dengan penguasaan teknologi digital yang mendalam. Selain itu, penguatan infrastruktur internet, khususnya di daerah dengan akses terbatas, harus menjadi prioritas utama. Pengembangan fitur-fitur tambahan yang memungkinkan revisi dokumen dan pengelolaan akun lebih

efisien akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas penggunaan aplikasi. Di samping itu, kebijakan yang mendukung transformasi digital harus diperkuat dengan regulasi yang jelas, insentif, dan evaluasi berkala agar e-Perda dapat menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi 2022. Jakarta: BPS.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). Laporan Transparansi Pemerintahan 2023. Jakarta: Kominfo.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemendagri. (2022). Studi Kompetensi Digital Pegawai Pemerintah Daerah. Jakarta: Kemendagri.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2023). Evaluasi Implementasi Aplikasi e-Perda di Jawa Timur. Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Kementerian Dalam Negeri. (2023). Laporan Tahunan Implementasi Aplikasi e-Perda. Jakarta: Kemendagri.